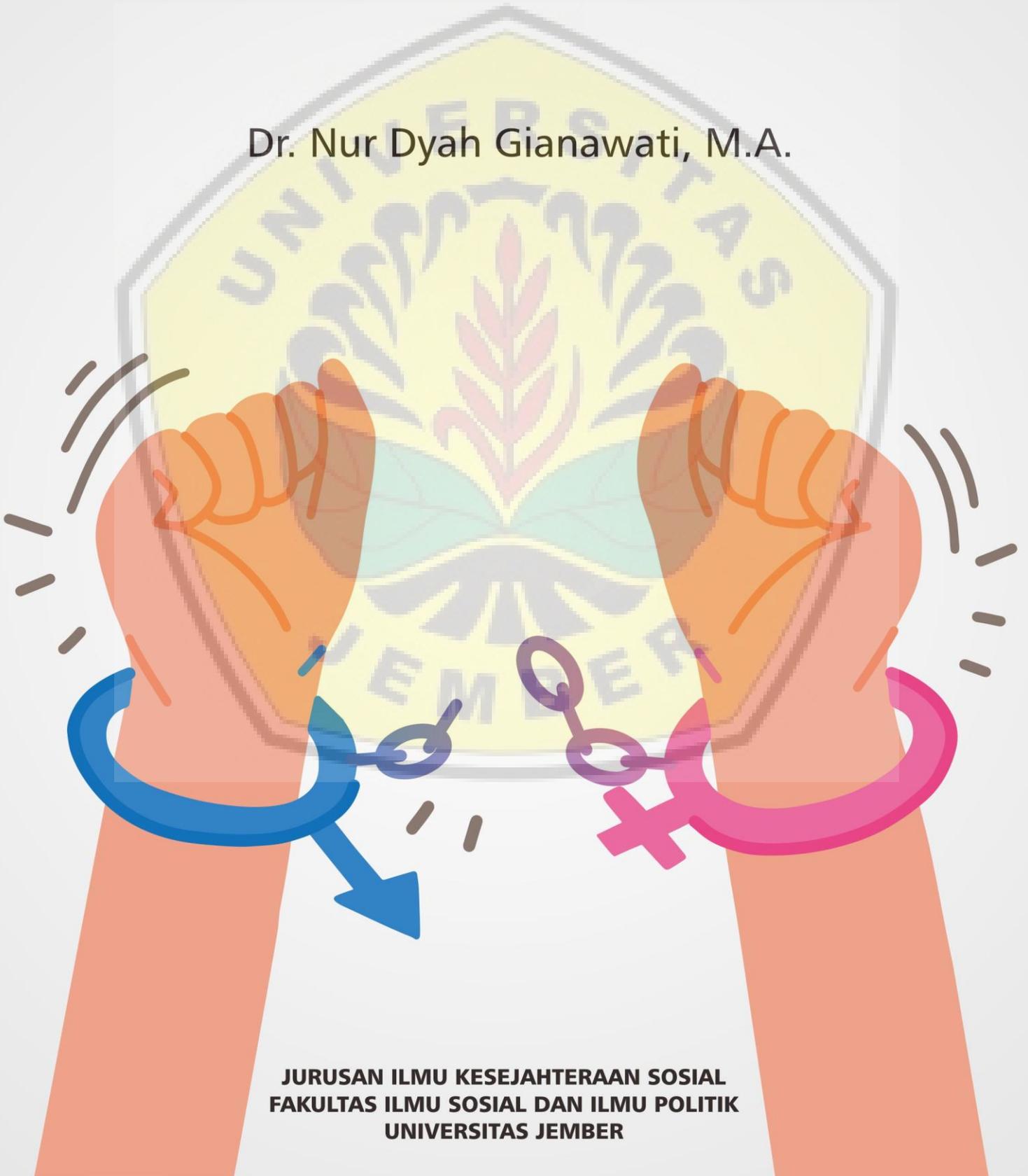


GENDER & PEMBERDAYAAN WANITA

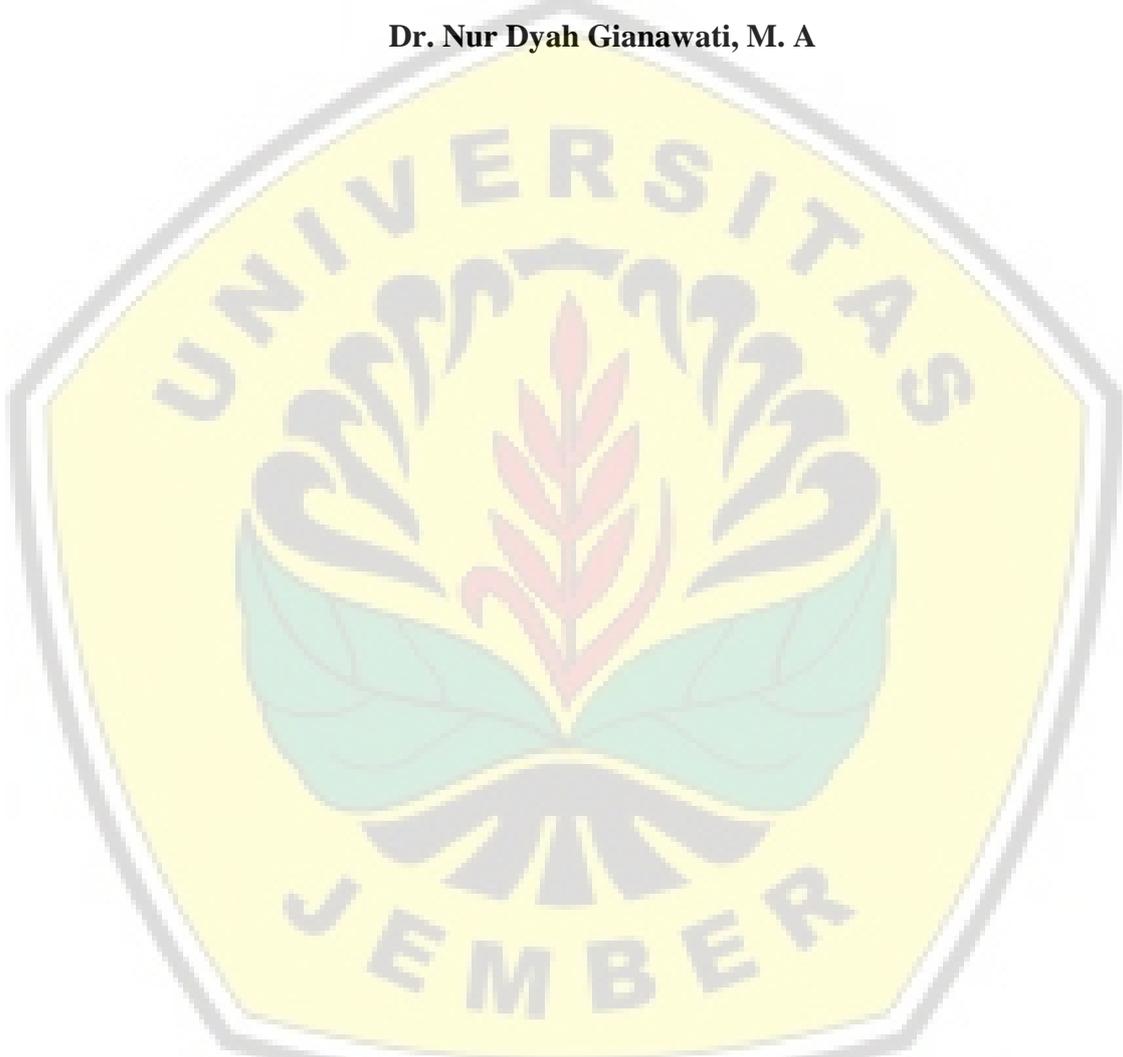
Dr. Nur Dyah Gianawati, M.A.



**MODUL PERKULIAHAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN WANITA**

Penyusun:

Dr. Nur Dyah Gianawati, M. A



**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
NOVEMBER, 2021**

DAFTAR ISI

MODUL PERTAMA	4
KONSEP, KESETARAAN DAN PERSOALAN KETIDAKADILAN GENDER.....	4
A. Konsep Dasar Gender	7
B. Gender dan persoalan ketidakadilan	16
C. Konsep Kesetaraan Gender	23
MODUL KEDUA	25
DINAMIKA GERAKAN WANITA DI INDONESIA.....	25
A. Emansipasi Wanita dan dilema wanita modern	25
B. Eksistensi Wanita di Indonesia	28
C. Gerakan Feminisme di Indonesia.....	31
MODUL KETIGA	40
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBANGUNAN	40
A. Pengarusutamaan Gender (<i>Gender Mainstreaming</i>).....	40
B. Gender dan Pembangunan.....	41
MODUL KEEMPAT	44
IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN WANITA DI RUANG PUBLIK	44
A. Pemberdayaan wanita di sektor politik	44
B. Pemberdayaan wanita di sektor perekonomian.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48

MODUL PERTAMA

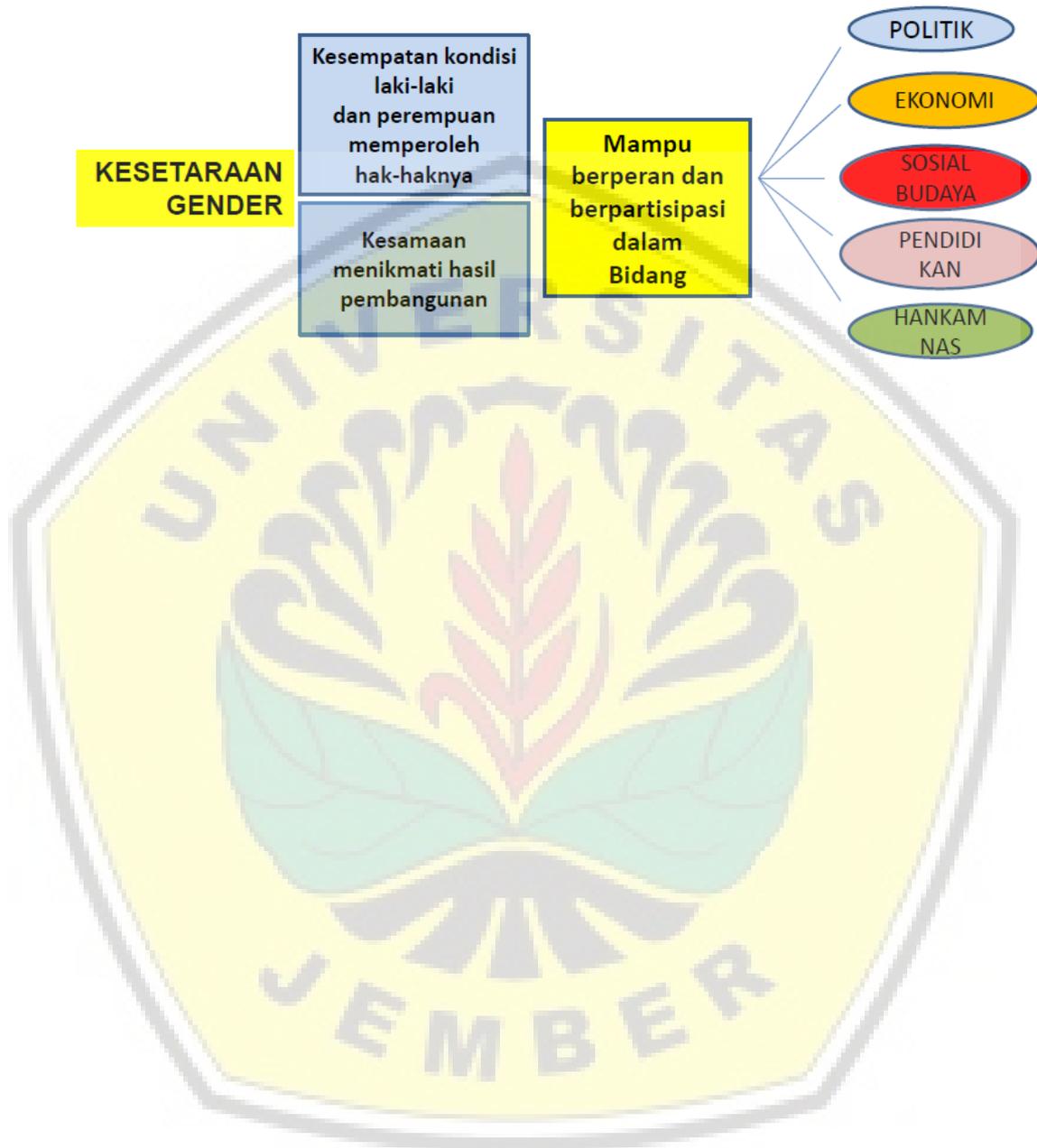
KONSEP, KESETARAAN DAN PERSOALAN KETIDAKADILAN GENDER

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai berbagai konsep fenomena yang terkait dengan gender dan pemberdayaan wanita di masyarakat. Materi perkuliahan ini meliputi konsep dasar gender, analisis masalah keterbelakangan dan ketidakberdayaan wanita, pemberdayaan wanita sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta untuk meningkatkan peran wanita dalam memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan. Secara umum melalui mata kuliah ini maka pekerja sosial mampu memahami ruang lingkup tugas utama sebagai pelaku akselerasi pemberdayaan wanita yang mengalami permasalahan gender.

Gender penting untuk dipahami dan dianalisis untuk melihat apakah perbedaan yang bukan alami ini telah menimbulkan diskriminasi dalam arti perbedaan yang membawa kerugian dan penderitaan terhadap wanita. Apakah gender telah memosisikan wanita secara nyata menjadi tidak setara dan menjadi subordinat oleh pihak laki-laki. Gender adalah semua atribut sosial mengenai laki-laki dan wanita, misalnya laki-laki digambarkan mempunyai sifat maskulin seperti keras, kuat, rasional, gagah. Sementara wanita digambarkan memiliki sifat feminin seperti halus, lemah, perasa, sopan, penakut. Perbedaan tersebut dipelajari dari keluarga, teman, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan dan kebudayaan, sekolah, tempat kerja, periklanan dan media.

Istilah “gender” diperkenalkan untuk mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara wanita dan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis. Jadi rumusan ‘gender’ dalam hal ini merujuk pada perbedaan-perbedaan antara wanita dengan laki-laki yang merupakan bentukan sosial, perbedaan-perbedaan yang tetap muncul meskipun tidak disebabkan oleh perbedaan-perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin (McDonald dkk., 1999).

menunjukkan eksistensinya dalam ranah publik. Sehingga antara budaya dan kesetaraan gender dapat berjalan seirama tanpa harus dipertentangkan.



MODUL KEDUA

DINAMIKA GERAKAN WANITA DI INDONESIA

A. Emansipasi Wanita dan dilema wanita modern

Emansipasi artinya memberikan hak yang sepatutnya diberikan kepada orang atau sekumpulan orang di mana hak tersebut sebelumnya dirampas atau diabaikan dari mereka. Dimana refleksi emansipasi yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini adalah untuk membawa perubahan besar kepada wanita Indonesia, yaitu perjuangan menuntut hak pendidikan bagi wanita. Karena kita ketahui bahwa dizaman dahulu, pendidikan bagi wanita ataupun kaum pribumi adalah hal yang sangat tabu dan sangat susah untuk dicapai. Sedangkan kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara dimana antara pria dan wanita dalam hak (hukum) dan kondisi (kualitas hidup) adalah sama. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan.

Sesungguhnya emansipasi yang sebenarnya adalah bentuk pemberian hak kepada wanita untuk mengembangkan diri dan kemahiran profesional agar bisa bergandeng bahu dengan lelaki dalam pembangunan negara. Tidak ada maksud negatif yang tersembunyi di sebalik gerakan emansipasi. Jikapun ada, itu kembali ke niat orang atau kumpulan yang memperjuangkannya dan apa latar belakang yang memotivasinya.

Istilah Emansipasi Wanita pada prinsipnya memberikan seluruh hak dasar manusia (Human Rights) kepada Wanita, misalnya hak berbicara, hak hidup, dan lain sebagainya. Namun wanita diharuskan berada pada kodrat. emansipasi merupakan tindak lanjut dari gagasan kesetaraan gender dalam bentuk tindakan nyata seorang wanita dalam kehidupannya. Alangkah lebih bijaksananya jika kita mengartikan dan memaknai emansipasi wanita sebagai salah satu bentuk kerjasama antara laki-laki dan wanita dalam

MODUL KETIGA

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBANGUNAN

A. Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*)

Pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender melalui poin terintergrasi masalah, aspirasi, kebutuhan, dan Permasalahan wanita dan laki laki harus dimasukkan ke dalam perencanaan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan program proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari seluruh kebijakan program dan proyek di seluruh sektor pembangunan telah diperhitungkan aspek gender yaitu melihat laki laki dan wanita sebagai pelaku yang setara dalam akses partisipasi dan kontrol atas pembangunan serta dalam memanfaatkan hasil pembangunan oleh karena itu pengarusutamaan gender atau PUG. Penting untuk memastikan apakah wanita dan laki laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya apakah wanita dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, apakah laki laki dan wanita mempunyai kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol terhadap pembangunan, dan apakah wanita dan laki laki menikmati hasil pembangunan. Tujuan akhir dari pengarusutamaan gender adalah mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender yang Mengantarkan pada pencapaian Kesetaraan gender. Melalui PUG diarahkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat akan lebih meningkat khususnya dalam mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

Pengimplementasian PUG di sektor dan daerah terlihat membawa perubahan mendasar terutama berkaitan dengan posisi wanita dalam keluarga dan masyarakat serta perannya dalam pembangunan semua bidang kehidupan. Tetapi di sini sudah tumbuh dan terlihat adanya peningkatan komitmen

berpartisipasi serta memperoleh manfaat dari proyek pembangunan. Adapun karakteristik dari pendekatan ini adalah sebagai berikut:

- Analisa gender dilakukan untuk melihat kondisi wanita dan laki laki yang memiliki peran dan posisi yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan gender yang berbeda.
- Wanita diposisikan sebagai subjek dan objek dalam proses pembangunan yang senantiasa mengedepankan proses Bottom up ketimbang top down.



MODUL KEEMPAT

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN WANITA DI RUANG PUBLIK

A. Pemberdayaan wanita di sektor politik

Berbagai kebijakan mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota legislatif dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Namun realitanya banyak partai politik yang belum memperhatikan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan. Pengarusutamaan gender belum maksimal dilaksanakan oleh berbagai pihak baik Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah. Hal ini diperparah dengan adanya kendala kultural, struktural dan personal yang dialami oleh perempuan dalam proses keterwakilan politik. Kajian ini berfokus pada keterwakilan politik perempuan yang berkeadilan dalam praktek demokrasi di Indonesia. Dalam kajian ini digunakan Teori pemberdayaan dan pemasaran politik yang bersentuhan dengan konsep Pengarusutamaan gender (PUJ). Tulisan ini menggunakan metode analisis data sekunder. Temuan data didapat dari analisis data-data sekunder dan kajian pustaka yang memadai khususnya mengenai keterwakilan politik perempuan yang berkeadilan. Kajian ini kemudian menghasilkan temuan bahwa untuk mencapai keterwakilan politik yang berkeadilan diperlukan berbagai upaya, diantaranya, (1) Penguatan kredibilitas caleg perempuan yang dikombinasi dengan kemampuan pemasaran politik; (2) Peningkatan Kemampuan Perempuan dalam berpartisipasi dan terlibat dalam pengambilan kebijakan di level partai politik; (3) Penerapan Strategi pemberdayaan dengan membangun komunikasi berbasis kultural dan nasionalis antara perempuan dengan pemilih; (4) Keterwakilan politik perempuan yang berkeadilan perlu diterapkan dalam semua lini kehidupan dan perlu didukung oleh semua pihak demi mencapai praktek demokrasi yang adil di Indonesia. Dengan diterapkannya keempat upaya tersebut diharapkan keterwakilan politik perempuan yang berkeadilan dapat menjadi upaya pemberdayaan perempuan dan sekaligus sebagai upaya pengarusutamaan gender sebagai usaha

yang berorientasi pada akses pendekatan perempuan miskin pada berbagai sumber daya yang vital merupakan langkah penting yang perlu dilakukan.

Salah satu bentuk program yang relevan untuk dilakukan adalah model pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha kerajinan batik tulis khas Merapi. Program pemberdayaan ini berhasil membentuk dua kelompok batik tulis yang dikelola oleh kelompok perempuan di wilayah relokasi bencana hunian tetap Kaliadem Mandiri. Kelompok ini sekaligus menjadi media untuk mendorong tingkat kesejahteraan, akses, partisipasi, kesadaran kritis dan kontrol perempuan miskin terhadap berbagai sumber daya produktif di sekitar mereka.

Model pemberdayaan perempuan miskin melalui pengembangan usaha batik tulis menjadi pintu masuk pengentasan kemiskinan komunitas perempuan korban erupsi Merapi. Dengan menjadi anggota pengrajin batik tulis dengan potensi pasar cukup tinggi sekaligus memiliki keunikan lokal akan mendorong tingkat kesejahteraan, akses, partisipasi, kesadaran kritis dan kontrol terhadap berbagai sumber daya yang ada di sekitar mereka.

Rekomendasi

Kelompok batik tulis yang dikelola oleh perempuan di lereng Merapi merupakan usaha sektor mikro dimana dalam operasionalnya masih berhadapan dengan problem khas usaha kecil yakni teknis usaha seperti persoalan kekurangan modal, keterbatasan kontrol teknologi tepat guna, jaringan pasar, keterampilan manajemen, keterampilan teknis produksi dan kemampuan pengembangan desain. Disamping itu, perempuan juga dihadapkan pada problem non teknis berupa stereotype dan pencitraan yang cenderung tidak menguntungkan. Oleh karena itu program pemberdayaan tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan dukungan sosial yang memadai. Nilai-nilai sosial yang memandang perempuan sebagai “orang rumahan”, pelaku ekonomi pinggiran, dan kelompok lemah perlu ditepikan untuk memastikan bahwa perempuan mempunyai ruang gerak yang layak untuk membuat mereka menjadi lebih “berdaya, baik secara ekonomi maupun sosial. Ketika perempuan berdaya secara ekonomi dan sosial maka posisi tawar, baik diruang privat maupun publik akan turut terangkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) - Survey Demografi dan Kesehatan 2002-2003
Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974
Labour Rights for Women – Gender Equality Training 2013
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia – Modul
Penegarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Di Indonesia 2008
Ridjal, Fauzie. Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta: Tiara
Wacana Yogya
ANGIN, RIA, 2009. Komunikasi Marketing Politik Caleg Perempuan Dalam
Pemilu. Laporan Penelitian. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Muhammadiyah Jember.
Abdullah, Irwan, (ed). 1997. SangkanParanGender. Yogyakarta: PustakaPelajar
Acker, Joan. 1988. "Women and Work in The Social Sciences". Dalam Strom-berg,
H. Ann, College, Pitzer and Horkers, Shirley. Women Working: The-ories
and Facts in Perspective. California: Mayfield Publishing Company,
Mountain View
Alexander, P dan}. Alexander. 1990. "Trade and Petty Commodity Production in
Early Twentieth Century Kebumen". Dalam The Shadow of Agriculture
Alimatus, Sahrah. 1996. "Takut Sukses Wanita Karier: Tmjauan dati Peran Jenis,
Status Identitas Diri dan Atribusi Kesuksesan". Disertasi. Yogyakarta: Pasca
Sarjana UGM
Alveson, Mats. 1994. Gender;Managers and Organizations.
New York: Walter de Gruyter-Berlin
Anderson, Benedict R.O.G. 1985. Mithology and the Tolerance of the Javanese.
Ithaca: Cornell University
Anderson, Margaret L dan Patricia Hill Collins. 1995. Race, Class and Gender.
Washington: Wadsworth Publishing Company
Andrew D., Jr., Szilogyi. 1984. Management and Performence. USA: Foresman
and Company

Anker, Richard and Catherine Hein. 1986. "Introduction and Overview". Dalam Sex Inequalities in Urban Employment in The Third World. London: The MacMillan Press
Arber, Sara dan Nigel Gilbert. 1992. Women and Working Lives: Divisions and Change. New York: St. Martin Press

